DAFTAR ISI

Sampul Dalam ii

Pernyataan Keaslian iii

Persetujuan Promotor iv

Persetujuan Tim Verifikasi v

Persetujuan Tim Penguji Tahap Pertama vi

Pengesahan Tim Penguji Tahap Kedua vii

Pernyataan Kesediaan Perbaikan Disertasi viii

Pedoman Transliterasi ix

Abstrak x

Ucapan Terima Kasih xiii

Daftar Isi xvii

Daftar Tabel xxi

Daftar Gambar xxiii

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 11

E. Kegunaan Penelitian 11

F. Kerangka Teoretik 13

G. Penelitian Terdahulu 17

H. Metode Penelitian 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 38

Bab II Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam 41

A. Politik 41

1. Konsepsi Politik 41

2. Politik Desentralisasi 43

a. Konsep Desentralisasi 43

b. Geneologi Desentralisasi di Indonesia 53

c. Desentralisasi Pendidikan di Indonesia 56

B. Kebijakan 63

1. Pengertian Kebijakan 63

2. Aktor Kebijakan 66

3. Teori Kebijakan 68

a. Teori Perumusan Kebijakan 71

b. Teori Implementasi Kebijakan 73

c. Teori Evaluasi Kebijakan 79

C. Pendidikan Islam 88

1. Pengertian Pendidikan Islam 88

2. Lembaga Pendidikan Islam 94

3. Madrasah Diniyah 105

D. Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam 112

1. Pengertian Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam 112

2. Relasi Politik dan Pendidikan Islam 113

3. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kebijakan Pemerintah Orde Lama dalam Bidang Pendidikan Islam 122
b. Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Bidang Pendidikan Islam 124
c. Kebijakan Pemerintah Orde Reformasi dalam Bidang Pendidikan Islam 127

Bab III Setting Penelitian..... 130

A. Sejarah Singkat Provinsi Jawa Timur 130
B. Wilayah dan Penduduk Provinsi Jawa Timur 133
C. Pendidikan Islam di Jawa Timur 137

Bab IV Latar Belakang, Dasar Hukum dan Tujuan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah 147

A. Latar Belakang 152
B. Dasar Hukum 166
C. Tujuan 176

Bab V Perumusan, Implementasi, Evaluasi, dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah..... 182

A. Perumusan Kebijakan Pemertintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah..... 182
B. Implementasi Kebijakan Pemertintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah..... 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah..... 261
D. Implikasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah 281
1. Implikasi Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah 281
2. Implikasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 285
Bab VI Penutup 296
A. Kesimpulan 296
B. Implikasi Teoretik 297
C. Keterbatasan Penelitian 302
D. Rekomendasi 304
Daftar Pustaka xxiv
Daftar Riwayat Hidup xxxvii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Unsur Pemerintahan Bidang Pendidikan 57

Tabel 2.2 Jenis-Jenis Keputusan Pendidikan Yang Dapat Didesentralisasikan 60

Tabel 2.3 Pendirian Lembaga Pendidikan Islam di Awal Abad ke-20 100

Tabel 2.4 Kurikulum Diniyah Wustho 110

Tabel 2.5 Kurikulum Diniyah Aliyah 110

Tabel 2.6 Struktur Kkurikulum Mata Pelajaran Madrasah diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Wustho, dan Ula 111

Tabel 3.1 Daftar Gubernur Jawa Timur dari Tahun 1945 Hingga Sekarang 132

Tabel 5.1 Alokasi Dana BPPDGS untuk Kabupaten/Kota Tahun 2010-2015 192

Tabel 5.2 Daftar PTAI Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah diniyah di Jawa Timur Tahun 2006 222

Tabel 5.3 Daftar PTAI Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah diniyah di Jawa Timur Tahun 2007 223

Tabel 5.4 Daftar PTAI Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah diniyah di Jawa Timur Tahun 2008 223

Tabel 5.5 Daftar PTAI Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah diniyah di Jawa Timur Tahun 2009 224

Tabel 5.6 Daftar PTAI Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diniyah di Jawa Timur Tahun 2010 224

Tabel 5.7 Daftar PTAI Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah diniyah di Jawa Timur Tahun 2011 225

Tabel 5.8 Daftar PTAI Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah diniyah di Jawa Timur Tahun 2012 226

Tabel 5.9 Daftar PTAI Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah diniyah di Jawa Timur Tahun 2013 227

Tabel 5.10 Daftar PTAI Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah diniyah di Jawa Timur Tahun 2014 228

Tabel 5.11 Daftar PTAI Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah diniyah di Jawa Timur Tahun 2015 228

Tabel 5.12 Rekapitulasi PTAI Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah diniyah di Jawa Timur Tahun 2006-2015 230

Tabel 5.13 Repitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi BPPDGS Madrasah diniyah Jawa Timur Tahun 2015 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Deliberatif 73

Gambar 3.1 Jumalah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Jawa Timur 134

Gambar 3.2 Luas Wilayah dan Jumlah Pendidikan Jawa Timur 136

Gambar 3.3 Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di Jawa Timur 138

Gambar 3.4 Jumlah Madrasah Diniyah di Jawa Timur 140

Gambar 3.5 Jumlah Ustadz Madrasah Diniyah di Jawa Timur 140

Gambar 3.6 Jumlah Santri Madrasah Diniyah di Jawa Timur 141

Gambar 3.7 Jumlah Pondok Pesantren di Jawa Timur 143

Gambar 3.8 Jumlah Santri Pondok Pesantren di Jawa Timur 144

Gambar 3.9 Jumlah Ustadz Pondok Pesantren di Jawa Timur 145

Gambar 5.1.Sasaran, Anggaran, dan Realisasi Dana BPPDGS Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015 191

Gambar 5.2.Skema Peran Ekskutif dan Legislatif Provinsi Jawa Timur dalam Penyusunan Kebijakan 214

Gambar 5.3.Gambar Mekanisme Penyaluran Dana BPPDGS 252

Gambar 5.4.Gambar Mekanisme Pelaporan BPPDGS 254

Gambar 5.5.Skema Triadik Kebijakan Pengembangan Madrasah Diniyah di Jawa Timur 280

Gambar 5.6.Implikasi Kebijakan Pengembangan Madrasah Diniyah di Jawa Timur 295

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id